

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : V
Rapat ke- : 11
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 07 Juni 2021
Waktu : 10.20 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Membahas:
1. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 dan 2021;
2. ABT 2021;
3. RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2022; dan
4. Isu-isu Aktual.
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) didampingi oleh Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG), G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-Gerindra), dan Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 40 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan);
2. Drs. Antam Novambar, S.H., M.Hum. (Sekretaris Jenderal sekaligus Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
3. Dr. Muhammad Yusuf. S.H., M.M. (Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan);
4. Dr. Ir. Muhammad Zaini Hanafi, M.Si. (Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan);

5. Dr. TB Haeru Rahayu (Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sekaligus Plt. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan);
6. Ir. Artati Widiarti, M.A. (Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
7. Ir. R. Sjarief Widjaja, Ph.D., FRINA. (Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
8. Dr. Ir. Rina, M.Si. (Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
9. Fatah Setiawan Topobroto (Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia);
10. Sigit Muhartono Direktur Utama PT Perikanan Nusantara (Persero); dan
11. Achmad Ardianto Direktur Utama PT Garam (Persero).

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 dan 2021, ABT 2021, RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2022, dan Isu-isu Aktual, dibuka pukul 10.20 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap usulan Pagu Anggaran Belanja pada tahun 2022 yang semula sebesar Rp6.122.087.397.000,00 (enam triliun seratus dua puluh dua miliar delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Namun Komisi IV DPR RI mendukung penambahan sebesar Rp8.043.438.587.000,00 (delapan triliun empat puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dengan program dan kegiatan prioritas pendukung pemulihan ekonomi nasional terutama masyarakat kelautan perikanan yakni, nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan serta pelaku usaha perikanan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp519.107.535.000,00 (lima ratus sembilan belas miliar seratus tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp59.051.084.000,00 (lima puluh sembilan miliar lima puluh satu juta delapan puluh empat ribu rupiah);

- b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp87.424.408.000,00 (delapan puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp1.116.716.000,00 (satu miliar seratus enam belas juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
- c. **Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**, sebesar Rp770.091.758.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh miliar sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp1.335.703.210.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- d. **Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya**, sebesar Rp1.143.447.870.000,00 (satu triliun seratus empat puluh tiga miliar empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp3.836.392.331.000,00 (tiga triliun delapan ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- e. **Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp384.597.909.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp394.243.213.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga belas ribu rupiah);
- f. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut**, sebesar Rp384.340.414.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus empat puluh juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp845.539.876.000,00 (delapan ratus empat puluh lima miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- g. **Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp966.276.909.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp365.843.654.000,00 (tiga ratus enam puluh lima miliar delapan ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);

- h. **Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp1.368.443.706.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp939.705.219.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus lima juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah); dan
 - i. **Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan**, sebesar Rp498.356.888.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp265.843.284.000,00 (dua ratus enam puluh lima miliar delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- 2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengoptimalkan anggaran belanja pada tahun 2021 serta melakukan pendalaman rencana anggaran belanja tahun 2022 secara terarah, terukur, dan akuntabel dengan prioritas program padat karya, bimbingan teknis dan penyuluhan untuk seluruh nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta pelaku usaha sektor kelautan perikanan, dengan memperhatikan kultur, kearifan lokal, serta potensi perikanan dan kelautan di daerah.
- 3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperkuat anggaran armada, sarana prasarana, dan personil Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam menjaga sumber daya Ikan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan.
- 4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat yang melakukan budi daya khususnya pada budi daya khususnya budi daya ikan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi serta pemasarannya di mana pada saat pandemi COVID-19 ini dapat membantu perekonomian mereka.
- 5. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyelesaikan penyaluran program dan kegiatan yang belum terealisasi pada Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2020 sebesar Rp114,85 miliar berserta anggaran pendampingan kelompok, berupa bantuan ikan konsumsi, udang, ikan hias, cacing sutera, kepiting, dan budi daya ikan dalam ember, mengingat kondisi saat ini masyarakat membutuhkan untuk pemulihan ekonomi mereka.

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempercepat target realisasi anggaran tahun 2021, sehingga program kegiatan dapat dirasakan oleh masyarakat kelautan dan perikanan.
7. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan percepatan penerbitan landasan hukum melalui Peraturan Perundang-undangan terhadap program Lumbung Ikan Nasional (LIN).
8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan kajian ulang seluruh program dan kegiatan di Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2022 sesuai dengan landasan hukum, arah kebijakan nasional, serta lebih memprioritaskan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan pemangku kepentingan kelautan perikanan.
9. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan penjelasan terhadap program dan kegiatan anggaran tahun 2022 secara terperinci serta jawaban tertulis paling lambat 3 hari setelah Rapat Kerja ini.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.40 WIB.

Menteri Kelautan dan Perikanan,

Ttd.

Sakti Wahyu Trenggono

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.
A-151